



RENJA TH.2024

DINAS KESEHATAN
KOTA METRO



JL. A.YANI NO.2, KELURAHAN METRO, KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO - LAMPUNG

e-mail: dinkeskotametro1@gmail.com - web : dinkes.metrokota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami telah dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024 ini juga sebagai gambaran rencana Program Pembangunan Kesehatan Kota Metro dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Metro.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat yang optimal melalui peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan secara merata, maka perlu kiranya dibuat Rancangan Rencana Kerja Program Pembangunan Kesehatan untuk dapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan Kesehatan pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kami, untuk itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Rencana Kerja ini.

Metro, 2024



KETUA DINAS KESEHATAN
KOTA METRO
DR. EKO HENDRO SAPUTRA, ST.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720310 199703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja..... 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 10

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 11

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat 12

III. TUJUAN, SASARAN 13

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 13

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 14

3.3 Program dan Kegiatan 15

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

V. PENUTUP 23

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang selaras dengan Tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan (Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009).

Pembangunan daerah Kota Metro merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, termasuk di dalamnya adalah pembangunan kesehatan di Kota Metro. Selain itu pembangunan kesehatan juga bertujuan meningkatkan kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Kota Metro dengan visi ***"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"***, ada lima misi yang harus di emban oleh pemerintah Kota Metro dan salah satu diantaranya berkaitan erat dengan masalah kesehatan yaitu ***"Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial"***.

Dalam RPJMD Kota Metro tertuang tujuannya adalah Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi :

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
- Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui JKN.

Arah Kebijakan :

- Menjamin akses dan mutu pelayanan Kesehatan
- Penerapan manajemen Puskesmas yang profesional dan akuntabel
- Meningkatkan sarana dan prasarana manajemen Rumah sakit
- Pemenuhan kebutuhan dr Spesialis
- Meningkatkan kepesertaan PBI-JKN yang tepat sasaran

GAMBARAN UMUM KESEHATAN KOTA METRO

A. Derajat Kesehatan

Gambaran mengenai derajat kesehatan mencakup indikator umur harapan hidup waktu lahir Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas, dan Morbiditas.

1. Umur harapan Hidup (UHH)

umur harapan hidup (UHH) Kota Metro yaitu 75,14 tahun (BPS-2023) dan untuk provinsi Lampung 74,17 tahun (BPS-2023).

2. Mortalitas

a. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (0-28 hari) pada tahun 2021 ada 6 kasus kematian dari 2543 kelahiran hidup (diperkirakan 2,3 per 1000 KH) disebabkan karena BBLR, Asfiksia Penyebab lainnya.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dapat digunakan untuk mengukur perubahan ketersediaan, tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta status sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan dari Sub.Koor Keluarga Dinas Kesehatan Kota Metro, pada tahun 2023 terdapat kematian bayi sebanyak 7 bayi dari 2.543 bayi kelahiran hidup (2,7 per 1000 kelahiran hidup).

b. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak yang berumur >1 - 5 tahun per 1000 kelahiran hidup, juga memberi gambaran mengenai status ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan dari Puskesmas pada tahun 2023, di Kota Metro kematian anak balita ada 1 anak.

c. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu melahirkan dapat digunakan untuk menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi dan PHBS, serta kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk Kota Metro jumlah kelahiran hidup masih belum mencapai 100.000 sehingga belum bisa diperkirakan angka kematian ibu (AKI). Sedangkan untuk jumlah kasus kematian ibu melahirkan, untuk tahun 2023 terdapat 5 kematian dari 2453 kelahiran hidup (0 per 100.000 KH).

3. Morbiditas

Angka kesakitan penduduk pada suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya pola penyakit dan penyakit potensial yang berkembang, baik penyakit menular maupun tidak menular. Pola penyakit yang ada di wilayah Kota Metro sampai tahun 2021, penyakit Hipertensi primer/essensial menduduki peringkat pertama pada pola penyakit rawat jalan di puskesmas.

Meningkatnya umur harapan hidup dan perubahan struktur umur penduduk ke arah usia tua menyebabkan terjadinya transisi epidemiologis, yang ditandai dengan masih tingginya penyakit Hipertensi primer/essensial.

Gambaran sepuluh besar penyakit pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sepuluh Penyakit Terbanyak pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Kota Metro Tahun 2023

NO	JENIS PENYAKIT	JUMLAH
1	J06.9-Acute upper respiratory infection, unspecified	12000
2	J00-Acute nasopharyngitis [common cold]	9112
3	K30-Dyspepsia	7519
4	I10-Essential (primary)hypertension	7248
5	M79.1-Myalgia	4625
6	J06-Acute upper respiratory Infection of multipleand unspecified sites	2173
7	A09-Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	2170
8	K00.6-Distubances in tooth eruption	2116
9	K04.0-Pulpitis	1865
10	J11-Influenza, virus not identified	1690

Sumber: Laporan e-Puskesmas tahun 2023

B. Keadaan Pelayanan Kesehatan

1. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Sarana pelayanan kesehatan dasar yang dimiliki kota Metro terdiri dari 11 Puskesmas induk dan jaringan pelayanannya yaitu 5 puskesmas pembantu (pustu) dan 11 mobil puskesmas keliling (pusling)/ambulans. Seluruh puskesmas telah dilengkapi dengan laboratorium sederhana dan dua diantara kedelapan puskesmas tersebut dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yaitu Puskesmas Banjar Sari. Dengan jumlah penduduk Kota Metro 174.258 jiwa pada tahun 2023.

2. Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasadiukur dengan jumlah RS dan tempat tidurnya (TT) serta rasio terhadap jumlah penduduk.

Rumah sakit yang ada di Kota Metro hingga akhir tahun 2023 sebanyak 9 unit, 2 rumah sakit milik pemerintah dan 7 rumah sakit milik swasta. Seluruh rumah sakit dilengkapi dengan laboratorium kesehatan dan duadiantara ketiga rumah sakit tersebut memiliki 4 (empat) spesialis dasar yaitu Rumah Sakit Umum Jend. A. Yani dan RSUD Sumbersari Bantul.

C. Keadaan sumber daya kesehatan

1. Sumber Daya Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga diselenggarakan oleh swasta. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Jajaran Dinas Kesehatan Kota Metro dan Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 2023 sebanyak 1.526 orang.

2. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan program pembangunan kesehatan di Kota Metro tahun 2019 bersumber dari Departemen Kesehatan (APBN), alokasi APBD Provinsi untuk kesehatan dan alokasi APBD Kota untuk kesehatan, untuk tingkat perkembangan pembiayaan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perkembangan Pembiayaan Kesehatan Kota
Metro Tahun 2018-2022

No.	SUMBER PEMBIAYAAN	TAHUN ANGGARAN (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	APBD II	210.602.057.387	243.991.232.624	415.132.737.402	305.684.248.146	316.134.902.064
2.	APBD I	0	0	0	0	0
3.	APBN	0	0	0	0	0
4.	BLN/Hibah	52.868.000	17.610.000	17.610.000	48.671.400	84.007.000
5.	Sumber lain	0	0	0	0	0
Jumlah		155.521.066.453	217.182.846.683	233.202.929.702	305.635.5776.746	316.218.909.064

Sumber: Subbag Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Metro

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2020 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro
- 6) Keputusan Walikota Metro Nomor 19 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Metro Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), dan terakhir diubah dengan Perda No. 3 tahun 2003.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
- 9) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 11) Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 12) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- 13) Perda Kota Metro No. 15 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA

Penyusunan Renja 2024 Dinas Kesehatan Kota Metro bertujuan untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan kesehatan dan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembangunan Kesehatan di Kota Metro dalam mencapai visi dan misi Kesehatan Kota Metro.

Penyusunan Renja merupakan bentuk upaya merumuskan program pembangunan kesehatan yang terpadu, komprehensif, fokus dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi terakhir yang berkembang baik tingkat lokal maupun tingkat nasional dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik lokal maupun nasional yaitu target standar pelayanan minimal (SPM), target SDGs tahun 2030, target RPJMD Kota Metro, Target Indikator Kinerja Dinas Kesehatan.

Dengan disusunnya Rencana kerja SKPD ini dapat terarah kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra yang ada baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

A. Program-program yang belum memenuhi target

Untuk semua program pada tahun 2023 yang terkait dengan IKU Dinas Kesehatan sudah terpenuhi capaiannya.

B. Program yang telah memenuhi target

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Persentase peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dengan indikator kinerja target 95 % dan realisasi sebesar 102,2%
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah kasus kematian bayi target 11 per 2.543 kelahiran hidup dan realisasi sebesar 7 per 2.543 kelahiran hidup.
3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Prevalensi stunting pada anak balita target 9% dan realisasi sebesar 4,07%
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dengan indikator kinerja Persentase puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standart target 93% dan realisasi 93%.
5. Program Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Angka keberhasilan pengobatan TBC (success rate) dengan target 95% dengan realisasi 102,22%
6. Program Kesehatan ibu dan anak, cakupan yang belum memenuhi target yaitu indikator angka kematian ibu target 3/100.000 Kelahiran Hidup realisasi 0/100.000 Kelahiran Hidup
7. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan yaitu Indeks Keluarga Sehat target 0,35 dengan realisasi 0,4
8. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yaitu Umur Harapan Hidup dengan target 72,04 tahun dan realisasi 75,14 tahun.
9. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator kinerja Presentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial target 94% dan realisasi 100%.

C. Implikasi yang timbul dalam pencapaian target

Dengan tercapainya target baik SPM, IKU RPJMD maupun SDG's dapat meningkatkan indeks pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro, hasil riset kesehatan dasar 2010 Kota Metro menduduki urutan ke 3 dari 480 kabupaten/Kota. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan sesuai dengan visi misi yang diharapkan. Hasil survey indeks kesehatan masyarakat yang dilaksanakan selama tiga tahun ini mendapat nilai baik dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan penilaian dari orang diluar kesehatan yaitu mahasiswa. Dan untuk standar pelayanan minimal (SPM) 100 % sudah tercapai, yang belum memenuhi target adalah cakupan morbiditas, untuk itu perlu mendapat perhatian khusus. Untuk SPM Kota Metro menduduki posisi ke 2 se-Indonesia.

Implikasi yang timbul dalam pencapaian target menunjukkan hasil kinerja di bidang kesehatan sudah baik tetapi perlu di optimalkan lagi dan mempertahankan target yang telah dicapai sehingga tahun yang akan datang tercapai targetnya, karena penyakit atau morbiditas dan kematian (mortalitas) akan selalu dapat terjadi di masyarakat, untuk itu perlunya pengetahuan masyarakat tentang preventif dan promotif lebih baik dari pengobatan (kuratif) dan rehabilitative.

D. Kebijakan dan perencanaan

Dengan melihat penyebab dari belum tercapainya target yang telah ditetapkan salah satunya adalah faktor anggaran yang sangat minim pada kegiatan di bidang kesehatan. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam menyikapi faktor tersebut. Sesuai dengan Kepmenkes tentang dana daerah untuk kesehatan adalah 10% dari APBD, selama ini belum sesuai dengan Kepmenkes. Mengingat kasus penyakit bertambah dengan adanya penyakit tidak menular yang mana selama ini belum menjadi prioritas dan saat ini menjadi penyebab kematian.

Dan untuk perencanaan kedepan perlu melihat dengan jelas isu strategis yang ada, sehingga dalam membuat kegiatan perlu prioritas yang harus dilaksanakan sehingga tujuan yang akan di capai dapat terwujud, perlu juga inovasi-inovasi dalam melaksanakan kegiatan, tidak hanya mengikuti kegiatan tahun lalu, tetapi membuat kegiatan yang lebih efektif dan bermanfaat di masyarakat.

Perlunya perencanaan yang sesuai dengan kondisi yang ada serta masalah dan kebutuhan dalam mencapai visi dan misi Kota Metro secara umum dan visi misi Dinas Kesehatan secara khusus, dan adanya kerjasama lintas program dalam merencanakan suatu kegiatan agar dapat saling mendukung dalam peningkatan pelayanan di masyarakat.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Untuk Tahun 2023 kinerja pelayanan kesehatan di IKU RPJMD dari 9 indikator kinerja indikator sudah terpenuhi targetnya, dan untuk SPM 12 indikator dan sudah mencapai target.

Dari hasil laporan akuntabilitas tahun 2023 dapat dilihat pencapaian target sesuai dengan indikator kinerja. Target dan Realiasi SPM (Standar pelayanan minimal) dan IKU RPJMD Kota Metro dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

A. Target dan Realisasi IKU (Indikator Kinerja Utama) RPJMD tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan Kesehatan	Persentase peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN)	95%	102,22%
		Angka Harapan Hidup	72,04	75,14
2	Meningkatnya upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Jumlah kasus kematian ibu	3	0
		Jumlah kasus kematian bayi	11	7
		Prevalensi stunting pada anak balita	9,0%	4,07%
		Angka keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	95%	96,72%
3	Meningkatnya sumberdaya manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tenaga Kesehatan sesuai standar	93%	93%
4	Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat Kesehatan	Presentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	94%	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Indeks keluarga sehat	0,22 (tidak sehat)	0,4 (tidak sehat)

2 Realisasi kinerja dengan target Nasional (SPM)

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021				OPD Penanggung Jawab
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	2.797	2.797	100	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	2.670	2.670	100	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	%	2.521	2.409	100	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	12.315	12.315	100	Dinas Kesehatan

5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	%	24.676	24.676	100	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	118.894	118.894	100	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	18.417	18.417	100	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	34.379	34.379	100	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	4.120	4.120	100	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) berat	%	303	303	100	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang tertugaTB	%	4.146	4.146	100	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	4.448	4.448	100	Dinas Kesehatan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD Dalam pelaksanaan pelayanan dan meningkatkan kinerja pelayanan baik di Dinas maupun Puskesmas serta jaringannya sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan yaitu SPM, sedangkan untuk koordinasi dan sinergi program dengan Dinas Kesehatan Propinsi selalu dilaksanakan baik melalui laporan lisan maupun tertulis. Kegiatan program yang adadi Propinsi baik yang dilaksanakan propinsi maupun yang dilaksanakan di daerah melalui dana dekon dan APBD TK I langsung dikoordinasikan. Sedangkan untukdana APBN berupa DAK koordinasi melalui Dinas Propinsi dalam menyampaikan proposal dan laporan Evaluasi. Dan untuk tahun 2022 ini pusat telah menggunakan software aplikasi yaitu E-Krisna, E-Renggar, E-Monev, E-Musrenbang, dan akan menggunakan E- Budgeting hal ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang adadi kesehatan.

Dengan berlandaskan visi “ *”Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat,Sejahtera, dan Berbudaya”*, maka isu strategis dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
- Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui JKN.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program, kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro telah menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019. Setelah di implimentasikan Program kegiatan tahun sebelumnya ke permendagri 90 tahun 2019 banyak kegiatan tahun sebelumnya yang tidak mempunyai ruang di sub kegiatan pemendagri 90 tahun 2019 solusinya menggabungkan 2 atau 3 kegiatan menjadi 1 sub kegiatan. Untuk pertimbangan di perlukan penambahan sub kegiatan di permendagri 90 tahun 2019 agar kegiatan yang tahun sebelumnya mendapat ruang di sub kegiatan permendagri 90 tahun 2021.

2.4.1 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

Usulan program kegiatan baik yang berasal dari seksi diharapkan ada hasil untuk masyarakat. Sedangkan usulan yang langsung dari masyarakat di mulai dari usulan masyarakat melalui kader posyandu, tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan, kelurahan dan kecamatan lalu dilaksanakan musrenbang kesehatan yang dilaksanakan awal tahun 2021, pertemuan Musrenbang kelurahan, kecamatan, Kota untuk membuat RKPD Tahun 2023. Dengan musrenbang kesehatan tersendiri di dapat usulan-usulan langsung dari masyarakat untuk perbaikan sarana kesehatan dan program kesehatan yang ada di masyarakat.

Usulan-usulan yang datang dari masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di dinas kesehatan yaitu perbaikan sarana, prasarana, kegiatan posyandu, PHBS, pemberian makanan tambahan, fogging, vaksinasi anak sekolah, dana PPM, dana Hibah untuk organisasi yang bergerak di bidang kesehatan.

Dan usulan-usulan tersebut sesuai dengan usulan-usulan yang ada di Dinas Kesehatan setiap tahunnya. Hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakat sudah merasa bahwa kesehatan sangat penting sehingga mereka berharap mendapat pelayanan dengan sarana dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Usulan untuk tahun 2023 juga melalui Usulan musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota yang memadukan usulan usulan dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan kesehatan di masyarakat. Dengan melihat kondisi yang ada, harapannya kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan suatu inovasi yang baik di tengah masyarakat agar tujuan yang akan di capai dapat terlaksana dengan sebaik baiknya, dengan melihat sasaran dan tujuan dari kesehatan itu sendiri.

BAB III TUJUAN, SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan SDM RPJMN tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan **pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*)** dengan mendorong peningkatan upaya **promotif dan preventif**, didukung **inovasi dan pemanfaatan teknologi**. Program nasional ke 3 adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan Program Prioritas Nasional yaitu Peningkatan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari kegiatan prioritas Nasional yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup sehat
3. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan reproduksi
4. Penguatan pengendalian penyakit

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan (UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009).

Untuk mencapai tujuan nasional perlu melihat ancaman dan tantangan yaitu komitmen Pemerintah daerah dalam desentralisasi kesehatan, kurangnya manajemen SDM terutama dokter dalam peningkatan akses pelayanan, koordinasi lintas program dan sektoral yang belum terintegrasi, sistem informasi pelayanan kesehatan dasar yang belum optimal, perlunya sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan. Dan sesuai dengan visi walikota perlu upaya-upaya untuk mencapai target SPM dan target Sdgs melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dana penunjang kegiatan tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 10 % dari APBD pemerintah Daerah, perlu kegiatan kegiatan yang inovatif yang dapat menunjang program untuk tercapainya kondisi masyarakat yang sehat dan berkeadilan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro adalah:

A. TUJUAN

1. Meningkatkan sistem dan Manajemen Kesehatan yang terintegrasi, efektif dan efisien
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan
4. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan

B. SASARAN

1. Terciptanya sistem dan manajemen kesehatan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
2. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan peran sertadan pemberdayaan masyarakat
3. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat melalui kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
4. Terwujutnya pelayanan kesehatan masyarakat yang merata
5. Terwujutnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan
6. Tercapainya derajat kesehatan perorangan dan keluarga
7. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

- a. **Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**
- ”Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”*, ada lima misi yang harus di emban oleh pemerintah Kota Metro dan salah satu diantaranya berkaitan erat dengan masalah kesehatan yaitu ”Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial”.
- Dalam RPJMD Kota Metro tertuang tujuannya adalah Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,dengan strategi :
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
 - Pemenuhan standar pelayanan puskesmas dan jaringannya
 - Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar
 - Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin melalui JKN.
- b. Program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun 2024 telah menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 terdiri dari 5 Program , 20 Kegiatan dan 73 sub kegiatan yaitu :

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub KEgiatan	Indikator Kinerja
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dok renja, Renstra
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD
1.02.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunya Dok Lakip dan SPIP
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Dokument (LPPD, Lap. SPM, PK,RKT,RAD, KAK, lap. Program/kegiatan)
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerjs Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima

		gaji dan tunjangan ASN
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusuann laporan keuangan akhir tahun SKPD
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dok Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
1.02.01.2.07	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.02.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun
1.02.02.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000
1.02.02.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang diitngkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar
1.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan
1.02.02.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas regional/Regional Maintanance Center
1.02.02.01.23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan dan Jumlah bahan habis pakai yang disediakan
1.02.02.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas

1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans

		kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan sekolah
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan Ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil informasi Kesehatan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan

		Kesehatan Rujukan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut

		pemeriksaan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1.02.05.2.02.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2024 program dan kegiatan telah sesuai Permendagri 90 tahun 2019 dapat di lihat sebagai berikut.

BAB V

PENUTUP

Demikian uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Metro Tahun Anggaran 2024, dan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian :

1. Kegiatan Preventif dan rehabilitatif merupakan kegiatan yang perlu ditingkatkan agar dana tidak banyak untuk kegiatan kuratif.
2. Prioritas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan perlu mendapat perhatian agar pelayanan publik dapat menghasilkan pelayanan prima.
4. Kota Metro telah melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional dengan indikator kinerja persentase peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan target 95% dan capaian tahun 2023 sebesar 102,22%.
5. Perlu dibuat Rencana Aksi daerah untuk pelaksanaan kegiatan baik yang ada di IKU RPJMD, SPM dan Sdgs.

LAMPIRAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
						I	II	III	IV	
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			Angka Harapan Hidup	angka	72.18	-	-	-	72.18	Rp 343,221,061,270
			Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98	24.5	24.5	24.5	24.5	
			Jumlah kasus kematian ibu	kasus	2	-	1	-	1	
			Jumlah kasus kematian bayi	kasus	10	2	3	2	3	
			Prevalensi stunting pada anak balita	%	8.5	2.13	2.13	2.13	2.13	
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (success rate)	%	95	23.75	23.75	23.75	23.75	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 288,199,777,013
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	dokumen	14	6	2	3	3	Rp 171,605,400
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 63,114,056,198
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	25	25	25	25	Rp 70,000,000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp 269,691,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp 270,451,181
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis penggandaan barang milik daerah	jenis	4	1	1	1	1	Rp 9,001,073,886
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang-barang milik daerah	bulan	12	3	3	3	3	Rp 4,085,477,750
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	puskesmas dan rsud	11 dan 2	3	3	3	4	Rp 211,217,421,598
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya		Jumlah kasus kematian neonatal	kasus	9	2	2	2	3	Rp 51,205,355,475
			Jumlah kasus kematian balita	kasus	12	3	3	3	3	
			Persentase balita wasting	%	5.6	1.4	1.4	1.4	1.4	
			Persentase ibu hamil KEK	%	12	3	3	3	3	
			Persentase anemia pada ibu hamil	%	18	4.5	4.5	4.5	4.5	

	Kesehatan Masyarakat		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	25	25	25	25	
			Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95	23.75	23.75	23.75	23.75	
			Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunisation)	%	100	25	25	25	25	
			Insiden Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	194.39	48.59	48.59	48.59	48.59	
			Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	%	12.99	3.25	3.25	3.25	3.24	
			Angka kesakitan (incidence rate) DBD	per 100.000 penduduk	67.81	16.95	16.95	16.95	16.95	
			Prevalensi HIV AIDS	%	0.013	0.003	0.003	0.003	0.003	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	%	81.8	20.45	20.45	20.45	20.45	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan	bulan	12	3	3	3	3	Rp 19,251,846,945
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 31,401,368,330
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen informasi kesehatan	dokumen	2	-	1	-	1	Rp 70,140,200
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan memiliki izin	%	100	25	25	25	25	Rp 482,000,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	93	23	23	23	24	Rp 778,314,600
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas memenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar	puskesmas	11	2	3	3	3	Rp 62,100,000
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan	%	100	25	25	25	25	Rp 716,214,600
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	94	23	24	24	23	Rp 107,180,000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya penerbitan sertifikat bagi produksi pangan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp 72,180,000

		Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Persentase Cakupan Ketercapaian Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	4	1	1	1	1	Rp 15,000,000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya pemeriksaan pada produksi makanan industri rumah tangga	%	100	25	25	25	25	Rp 20,000,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Indeks Keluarga Sehat	angka	0.35	-	-	-	0.35	Rp 1,776,391,000
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya advokasi dan pemberdayaan masyarakat lintas sektor	%	100	25	25	25	25	Rp 340,591,000
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan melaksanakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat	kelurahan	22	5	5	6	6	Rp 40,000,000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pengembangan dan pelaksanaan UKBM	%	100	25	25	25	25	Rp 1,395,800,000